

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penghindaran pajak telah menjadi salah satu isu terbesar dalam tata kelola perusahaan karena memiliki dampak besar terhadap transparansi keuangan, akuntabilitas perusahaan, dan keadilan sosial (Amara et al 2025). Penghindaran pajak merupakan keputusan ekonomi nyata yang menghasilkan penghematan kas yang signifikan, baik melalui penundaan pembayaran pajak selama beberapa tahun, maupun dengan menghindari pembayaran pajak secara permanen (Habib et al., 2024; Wilson, 2009). Meskipun praktik ini legal dan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, tindakan ini bertentangan dengan semangat peraturan perpajakan dan dapat mengikis kepercayaan pemangku kepentingan (Amara et al., 2025).

Menurut Rejeki et al. (2019), penghindaran pajak merupakan strategi yang dilakukan wajib pajak secara sah dan tidak melanggar aturan, karena masih berada dalam batas hukum perpajakan. Praktik ini biasanya memanfaatkan celah atau kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Akibatnya, penghindaran pajak menjadi salah satu tantangan serius dalam keuangan negara karena berdampak pada menurunnya penerimaan pajak.

Di Indonesia, salah satu kasus yang terjadi adalah dugaan praktik penghindaran pajak oleh PT Bhaktiagung Propertindo Tbk (BAPI). Pada tahun 2024, BAPI ditetapkan menjadi tersangka korporasi karena tidak melaporkan SPT

masa PPh Pasal 4 ayat (2) secara benar atau lengkap untuk periode Agustus hingga Desember, serta tidak menyampaikan SPT tahunan. Permasalahan ini mencerminkan adanya ketidak patuhan fiskal yang serius dari pihak manajemen perusahaan, yang dengan sengaja menghindari pelaporan pajak sebagaimana mestinya, akibatnya negara dirugikan sebesar Rp 2,9 miliar (DJP, 2024).



Gambar 1. 1 Grafik Penghindaran Pajak

Sumber : www.idx.co.id

Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu rasio antara total beban pajak dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai ETR, maka semakin tinggi Tingkat penghindaran pajak yang dilakukan Perusahaan (Frank et al., 2009; Gaaya et al., 2017). Analisis grafik ETR pada lima Perusahaan *property* dan *real estat* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024 menunjukkan variasi yang mencolok. Fortune Mate Indonesia Tbk (FMII) memiliki ETR tinggi mendekati 8 pada 2020, menandakan kepatuhan pajak relatif baik, sementara Indonesian Paradise Properti Tbk (INPP) berada pada

posisi menengah dengan ETR sekitar 1-2. Sebaliknya, Megapolitan Development Tbk (EMDE), Metropolitan Land Tbk (MTLA), dan Pollux Hotels Group Tbk (POLI) konsisten mencatat ETR rendah dibawah 1, mengindikasikan kecenderungan penghindaran pajak yang lebih tinggi. Tren penurunan ETR secara keseluruhan menegaskan adanya praktik perencanaan pajak yang agresif. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menelaah faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, khususnya kualitas audit, insentif ekuitas manajemen, dan kepemimpinan Perempuan dalam komite audit sebagai bagian dari tata Kelola Perusahaan.

Salah satu faktor penting yang memengaruhi penghindaran pajak Adalah kualitas audit, yang umumnya diproksi melalui *audit fee*. *Audit fee* merefleksikan sumber daya dan waktu yang dicurahkan auditor untuk memeriksa laporan keuangan. Semakin besar *audit fee* , semakin tinggi kualitas audit, karena auditor lebih mampu mendeteksi dan memperbaiki kesalahan penyajian (Li & Liu, 2024). Audit berkualitas tinggi meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan dan berfungsi sebagai penghambat perencanaan pajak agresif melalui penerepan regulasi dan pengawasan yang lebih ketat (Qawqzeh, 2023). Perusahaan dengan kualitas audit baik cenderung memiliki transparansi keuangan lebih tinggi dan Tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah (Al Lawati & Hussainey, 2021).

Selain itu, insentif ekuitas manajemen juga berperan penting. Insentif ekuitas Adalah kompensasi berbasis saham seperti kepemilikan saham atau opsi saham yang diberikan kepada eksekutif agar kepentingan mereka selaras dengan pemegang saham (Armstrong et al., 2015). Akan tetapi, karena harga saham

dipengaruhi oleh laba bersih setelah pajak, insentif ini berpotensi mendorong manajer untuk menekan beban pajak secara agresif agar kinerja laba tampak lebih tinggi. Dengan demikian, insentif ekuitas dapat menjadi faktor yang bersifat ganda, di satu sisi mampu meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi di sisi lain berpotensi memperbesar praktik penghindaran pajak terutama ketika mekanisme pengendalian internal perusahaan lemah (Xie et al., 2023).

Kehadiran Perempuan dalam kepemimpinan komite audit, khususnya sebagai ketua, dipandang sebagai faktor yang memperkuat fungsi pengawasan. Perempuan sering kali dikaitkan dengan gaya pengambilan Keputusan yang lebih berhati-hati, transparan, dan etis (Amara et al., 2025). Perempuan dalam peran kepemimpinan membawa perspektif unik yang dibentuk oleh pengalaman hidup yang beragam, peran dalam masyarakat, dan tantangan profesional (Al-Matari, 2024; Alshdaifat et al., 2024b). Perspektif ini dapat meningkatkan kesadaran etika, karena pemimpin Perempuan cenderung mengedepankan transparansi, keadilan, dan kepentingan jangka panjang para pemangku kepentingan. Kesadaran etika semacam ini sangat penting dalam menghadapi tantangan organisasi yang kompleks, berkolaborasi, dan mengambil keputusan strategis serta keuangan yang selaras dengan tanggung jawab sosial dan korporasi yang lebih luas (Abdulrahman & Amoush, 2020).

Dalam konteks ini, ketua perempuan dalam komite audit (*Female Audit Committee Chairs/FACCs*) menjadi bidang yang semakin menarik untuk diteliti. Sebagai pemimpin dalam komite audit, *FACCs* memiliki peran penting dalam mengawasi pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan kepatuhan (Ayinla et

al., 2022). Gaya kepemimpinan dan perspektif mereka dapat memberikan kontribusi besar terhadap sistem pengawasan internal dan praktik keuangan yang beretika serta pengurangan penghindaran pajak (Alshdaifat et al., 2024a).

Penelitian yang dilakukan oleh Mansour et al. (2024) di Inggris menunjukkan bahwa komite audit yang dipimpin Perempuan memperkuat efek negatif kualitas audit terhadap penghindaran pajak. Berlinna & Supriyono (2023) di Indonesia juga menunjukkan bahwa keberadaan Perempuan dalam komite audit mempengaruhi tingginya *audit fee*, yang menunjukkan kualitas audit yang lebih baik. Hasna Annida Zulfa et al. (2023) juga menemukan bahwa *gender diversity* di Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak di sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI. Namun, penelitian lainnya, seperti yang dilakukan oleh Winasis & Yuyetta (2022), menunjukkan hasil yang inkonsisten, dimana keberagaman gender di komite audit justru berkorelasi positif dengan agresivitas pajak, yang menunjukkan adanya perbedaan hasil dalam konteks yang berbeda.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak sudah banyak diteliti di berbagai negara. Diantaranya Amara et al. (2025) meneliti tentang pengaruh interaksi kepemimpinan Perempuan dalam komite audit terhadap hubungan kualitas audit dan penghindaran pajak di Inggris, serta menunjukkan bahwa keberadaan ketua komite audit perempuan memiliki efek moderasi yang signifikan. Selain itu, studi oleh Lanis & Richardson (2011) di Australia menunjukkan bahwa *corporate governance* berperan penting dalam menekan agresivitas pajak. Penelitian oleh Chen et al. (2021) di Tiongkok membuktikan

bahwa perusahaan dengan struktur dewan yang lebih etis cenderung melakukan penghindaran pajak lebih rendah.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak telah dilakukan di Indonesia. Liani et al. (2023) meneliti terkait komite audit, kualitas audit dan *capital intensity*, Prasetyo et al. (2022) juga menunjukkan bahwa keberadaan komite audit dan independensi anggota dewan mampu meminimalisir strategi penghindaran pajak. Sementara itu, Sherly (2024) menemukan bahwa biaya audit dan opini audit yang dimoderasi oleh keberadaan dewan direksi perempuan tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Berlinna & Supriyono (2023) menunjukkan bahwa keberadaan perempuan dalam komite audit berpengaruh terhadap tingginya *audit fee*, yang menunjukkan kualitas audit yang lebih baik.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh interaksi kepemimpinan Perempuan dalam komite audit terhadap hubungan antara kualitas audit, insentif ekuitas manajemen, dan penghindaran pajak. Penelitian ini penting untuk diteliti karena belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji peran kepemimpinan Perempuan dalam komite audit sebagai variabel moderasi dalam kaitannya dengan perilaku penghindaran pajak, khususnya pada Perusahaan sektor Properti dan *real estat* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Sektor properti dan *real estat* dipilih karena memiliki tata Kelola yang kompleks dan sering dikaitkan dengan tingkat kepatuhan fiskal yang rendah. Dalam konteks ini, kepemimpinan Perempuan dalam komite audit diharapkan dapat membawa perspektif baru yang lebih etis, transparan dan akuntabel, sehingga

mampu memperkuat pengawasan dan mengurangi kecenderungan manajemen untuk bertindak oportunistik, termasuk dalam memanfaatkan insentif saham guna menghindari pajak.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur audit dan tata kelola perusahaan dengan mengkaji secara empiris bagaimana kualitas audit dan insentif ekuitas manajemen memengaruhi penghindaran pajak, serta peran kepemimpinan perempuan dalam komite audit sebagai variabel moderasi. Temuan menunjukkan bahwa perusahaan dengan kualitas audit yang tinggi cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Efek ini menjadi lebih kuat ketika komite audit dipimpin oleh perempuan, menunjukkan bahwa karakteristik gender dalam struktur pengawasan dapat memperkuat fungsi monitoring. Dengan demikian, penelitian ini memperluas teori agensi melalui bukti baru mengenai pentingnya keberagaman gender dalam memperkuat pengawasan internal dan transparansi fiskal. Penelitian ini juga relevan secara praktis, terutama bagi regulator dan pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan yang mendorong keterwakilan perempuan dalam posisi pengawasan strategis, khususnya pada perusahaan dengan tata kelola yang lemah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah insentif ekuitas manajemen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

3. Apakah kepemimpinan Perempuan dalam komite audit memoderasi kualitas audit terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah kepemimpinan Perempuan dalam komite audit memoderasi insentif ekuitas manajemen terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris bahwa :

1. Pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak.
2. Pengaruh insentif ekuitas manajemen terhadap penghindaran pajak.
3. Pengaruh kepemimpinan Perempuan dalam komite audit memoderasi hubungan antara kualitas audit terhadap penghindaran pajak.
4. Pengaruh kepemimpinan Perempuan dalam komite audit memoderasi hubungan antara insentif ekuitas manajemen terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini memberikan wawasan praktis bagi perusahaan mengenai pentingnya membentuk komite audit yang efektif dan inklusif, serta melibatkan Perempuan dalam posisi kepemimpinan. Perusahaan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk memperkuat pengawasan

internal dan mengurangi praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan reputasi dan kestabilan Perusahaan.

2. Bagi investor

Sebagai sumber informasi dan pertimbangan yang relevan dalam mengambil keputusan investasi di perusahaan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mendalami bidang tata Kelola perusahaan, keberagaman gender dan kebijakan perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara umum penelitian ini terdiri dari beberapa sub bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Secara umum sistematika penulisan yang diajukan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini menjabarkan mengenai gambaran penelitian secara umum dengan uraian teridir dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori dan pengembangan hipotesis, merupakan bab yang menjelaskan mengenai teori-teori, dasar pemikiran dan penelitian sebelumnya untuk pengembangan hipotesis, landasan teori menjadi dasar bagi penulis untuk mengembangkan dan membentuk hipotesis awal penelitian guna memecahkan pertanyaan penelitian.

BAB III Metodologi penelitian, bab ini menjabarkan keterangan tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian (variabel dependen, variabel independent dan variabel control), populasi, sampel data yang akan digunakan dalam penelitian, sumber data dan metode perhitungan serta model pengujian yang akan digunakan.

BAB IV Analisa hasil dan Pembahasan, bagian ini akan membahas mengenai bagian umum objek penelitian yang berisi penjelasan secara deskriptif variabel-variabel yang berkaitan dengan masalah penelitian, analisis data yang bertujuan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, dan pembahasan yang lebih luas serta implikasi dari hasil analisis.

BAB V Penutup, dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan peneliti dan saran bagi penelitian selanjutnya. Saran yang disampaikan dalam penelitian kali ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi institusi yang berkaitan maupun bagi dunia penelitian.